

PERAN PENDIDIKAN NONFORMAL UNTUK PEMASYARAKATAN LITERASI MEDIA

Oleh

M. Syukri

(IP, FKIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak)

Abstrak: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan tantangan agar manusia memiliki kemampuan literasi lain, di luar melek-huruf. Mengingat, melek-aksara terkait dengan perkembangan media cetak yang mendorong orang untuk mampu membaca dan menulis. Dilihat dari perkembangan/perubahan masyarakat dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri lalu masyarakat informasi. Banyak pakar yang memperkirakan bahwa kehidupan umat manusia pada masa depan akan banyak bergantung pada teknologi komunikasi dan informasi.

Kata kunci: Pendidikan nonformal, literasi media

Pendahuluan

Umat manusia belum mampu menyelesaikan permasalahan buta huruf yang masih diderita jutaan orang di dunia. Berdasarkan data UNESCO Institute of Statistic, seperti dikutip *Education Today*, pada tahun 2000 ada 877 juta orang buta aksara. Bahkan diperkirakan pada tahun 2003, menurut laporan *Education Today*, ada 990 juta manusia yang buta aksara yang terdiri atas 877 juta orang dewasa dan 113 anak-anak.

Belum lagi tantangan untuk memampukan manusia menjadi melek-aksara bisa diselesaikan, umat manusia dihadapkan pada tantangan untuk mengembangkan pembelajaran yang mendorong manusia untuk memiliki literasi (*literacy*) yang lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan tantangan agar manusia memiliki kemampuan literasi lain, di luar melek-huruf. Wajar bila dinyatakan bahwa definisi literasi kini sudah berubah dan akan terus berubah (Oberg, 1993:9). Mengingat, melek-aksara terkait dengan perkembangan media cetak yang mendorong orang untuk mampu membaca dan menulis.

Rogers (1986:25) menguraikan kronologi komunikasi manusia. Huruf pertama kali diperkenalkan Bangsa Sumeria pada tahun 4.000 SM dengan medium lempengan tanah liat. Sedangkan pencetakan buku dimulai pertama kali tahun 1041 di Cina setelah Pi Sheng menemukan mesin cetak sederhana. Namun perkembangan pesat terjadi setelah Johann Guttenber menggunakan mesin cetak metal yang mendorong lahirnya barang cetakan pada tahun 1456. Lahirnya mesin cetak melahirkan kebutuhan kemampuan membaca dan menulis, karena dengan adanya mesin cetak memungkinkan produksi massal bahan bacaan. Bahkan berbagai kepentingan administrasi publik dan swasta pun menggunakan formulir yang tercetak yang harus diisi oleh masyarakat yang berhubungan dengan institusi publik dan swasta itu.

Bila kita perhatikan perkembangan/perubahan sosial seperti yang diuraikan Rogers (1986) bisa dilihat perkembangan/perubahan masyarakat dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri lalu masyarakat informasi. Pada masing-masing masyarakat tersebut, memiliki

karakteristiknya masing-masing. Memang, bila mengacu pada karakteristik yang dibuat Rogers tersebut, saat ini ketiga bentuk masyarakat itu masih hadir di muka bumi artinya berkembangnya masyarakat informasi tidak serta merta menggantikan masyarakat industrial dan pertanian. Di Indonesia misalnya bisa dilihat bahwa ada warga masyarakat yang hidup dalam peradaban masyarakat agraris, namun ada juga yang hidup dalam masyarakat informasi.

Permasalahan

Kesiapan masyarakat menghadapi ledakan arus informasi dan hiburan melalui media massa tidaklah datang dengan sendirinya sejalan dengan makin banyaknya ragam media massa. Ada warga masyarakat yang hidup dalam peradaban masyarakat agraris, namun ada juga yang hidup dalam masyarakat informasi. Dalam konteks pendidikan melek media (literasi media) bagi masyarakat, melalui pendidikan nonformal, ada beberapa pertanyaan yang mesti dijawab. adalah (a) masalah atau isu pendidikan nonformal apakah yang dapat diprediksikan timbul di masa depan?, (b) apakah pendidikan nonformal di masa depan itu akan lebih baik atau lebih buruk dari keadaan pendidikan nonformal pada masa sekarang?, (c) perkembangan menarik apakah yang mungkin terjadi dalam pendidikan nonformal pada beberapa kurun waktu yang akan datang?, dan (d) apakah signifikansi pendidikan nonformal pada masa depan itu bagi kehidupan? Dalam paparan ini hanya akan dibahas tentang bagaimana peran pendidikan nonformal bagi masyarakat untuk masa depan ? dan apa yang telah dilakukan oleh beberapa negara di dunia dan apa dan bagaimana persiapan dan upaya yang telah

dilaksanakan di Indonesia terutama pendidikan literasi media bagi masyarakat dalam era iptek yang berkembang sangat cepat?

Metode Kajian

Secara metodologi telaah permasalahan di atas melalui kajian literatur dan hasil-hasil penelitian tentang pendidikan literasi media yang dilakukan oleh para para peneliti. Alasan menggunakan metode ini merupakan landasan sebagai pijakan memahami konsep dan strategi untuk lebih memahami secara komprehensif dan mendalam tentang peran pendidikan nonformal dan pendidikan literasi media bagi pendidikan masyarakat untuk masa depan. Dengan memperhatikan semakin derasnya informasi melalui berbagai sumber media massa baik dari media cetak maupun elektronik, termasuk internet.

Pendidikan nonformal dan Masyarakat Masa Depan

Perubahan merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam kehidupan individu dan sosial. Akan halnya perubahan sosial, dapat berlangsung karena direncanakan seperti melalui berbagai program pembangunan namun dapat juga terjadi tanpa direncanakan sebagai akibat faktor-faktor yang ada pada diri masyarakat itu sendiri. Dalam mengkaji arah perubahan tersebut, manusia mengembangkan kajian masa depan.

Hasil kajian atas masa depan itu merupakan langkah umat manusia untuk mengantisipasi perubahan sekaligus memberi arah perubahan. Salah satu kajian masa depan itu, seperti tercermin dalam Buku Putih hasil *21st Century Literacy Summit* di Berlin adalah berkembangnya literasi baru yang diperlukan masyarakat untuk hidup pada era perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Manusia perlu menyesuaikan diri dan

pemerintah di berbagai negara pun perlu mengembangkan kebijakan yang akan menumbuhkembangkan literasi baru yang diperlukan masyarakat.

Berkenaan dengan keterkaitan kajian masa depan dan pendidikan nonformal, Sudjana (2000:308) menunjukkan beberapa pertanyaan yang mesti dijawab. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah (a) Masalah atau isu pendidikan nonformal apakah yang dapat diprediksikan timbul di masa depan?, (b) apakah pendidikan nonformal di masa depan itu akan lebih baik atau lebih buruk dari keadaan pendidikan nonformal pada masa sekarang?, (c) perkembangan menarik apakah yang mungkin terjadi dalam pendidikan nonformal pada beberapa kurun waktu yang akan datang?, dan (d) apakah signifikansi pendidikan nonformal pada masa depan itu bagi kehidupan?

Banyak pakar yang memperkirakan bahwa kehidupan umat manusia pada masa depan akan banyak bergantung pada teknologi komunikasi dan informasi. Berbagai kegiatan yang pada awalnya dilakukan secara manual dan bertatap muka kini digantikan dengan mesin yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi tersebut. Mengambil uang di bank tidak harus dilakukan pada saat jam kerja pada *teller* di bank melainkan melalui ATM dan membeli barang bisa dilakukan dengan melalui internet dan pembayarannya menggunakan kartu kredit. Bahkan di beberapa tempat di Indonesia, seperti di Kabupaten Kutai Timur mulai menerapkan *e-government* sehingga warga masyarakat tak perlu pergi ke kantor kelurahan untuk membuat KTP melainkan cukup mengakses situs yang disediakan untuk keperluan tersebut melalui internet atau melalui telepon.

Pentingnya Pendidikan Literasi Media

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut mengubah pula lanskap komunikasi manusia. Batasan mengenai radio siaran swasta yang hanya bisa bersiaran secara lokal, kini tak mungkin lagi dibatasi karena ada fasilitas satelit, radio yang dipancarkan di Jakarta dapat ditangkap di berbagai daerah yang berada dalam jangkauan *footprint* satelit. Bahkan untuk mendengarkan siaran radio pun tak perlu menggunakan pesawat radio melainkan cukup menggunakan komputer yang tersambung ke internet. Media cetak pun tak hanya tampil dalam bentuk barang cetakan melainkan juga tampil secara digital seperti *Kompas.com*, *Pikiran-Rakyat Online* atau *Tempo Interaktif*.

Dalam pada itu, setelah Indonesia mengalami reformasi politik, media massa bertumbuh dengan sangat pesat. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling banyak memiliki stasiun televisi yang mengudara secara nasional yakni 11 stasiun, selain ada sejumlah stasiun televisi yang mengudara secara regional yang dimiliki TVRI dan sejumlah stasiun televisi lokal seperti Sangatta TV, JTV atau Papua TV. Ada pun jumlah media cetak, tak bisa diketahui dengan pasti mengingat saat ini tak lagi diperlukan surat ijin untuk menerbitkan media cetak.

Namun pesatnya perkembangan media massa tersebut tak diikuti dengan kesiapan masyarakat. Kontrol publik terhadap media massa sangatlah rendah. Masyarakat seolah menempatkan diri pada posisi sebagai konsumen yang akan menerima apa saja yang disampaikan media massa. Masyarakat belum menjadi pengontrol media massa yang membuat media massa tidak melulu beroperasi dengan pertimbangan bisnis, melainkan juga melaksanakan fungsi ideal media

massa yakni mendidik, mempengaruhi, menghibur dan menginformasikan.

Di sejumlah negara, masyarakatnya sudah mulai dipersiapkan untuk menghadapi era komunikasi dan informasi itu dengan mengembangkan literasi-literasi baru. Gerakan literasi media (*media literacy*) merupakan salah satu langkah untuk mengembangkan daya-daya publik menghadapi media massa. Publik diajak untuk menerima begitu saja apa yang disampaikan media massa, melainkan menerimanya dengan penuh daya kritis. Dalam dunia yang semakin menyatu ini, literasi media merupakan salah satu hal yang direkomendasikan untuk dikembangkan di berbagai negara pada *21st Century Literacy Summit* di Berlin, 7-8 Maret 2002.

Gerakan literasi media ini sudah dikembangkan di berbagai negara. Di Amerika Serikat, gerakan ini banyak dipelopori perguruan tinggi yang menjalankan proyek-proyek literasi media seperti New Mexico Literacy Project yang dijalankan University of New Mexico dan di State University of Appalachian membuka program S-2 literasi media, di Kanada dijalankan Departemen Pendidikan yang memasukkan literasi media ke dalam kegiatan ekstra kurikuler di sekolah, di Australia banyak dipelopori perguruan tinggi khususnya Universitas Edith Cowan, Universitas Sidney dan Universitas Mcquire. Di Rusia, sejak tahun 2002, literasi media menjadi salah satu program studi di perguruan tinggi (lihat Center for Media Literacy, 2003 & Fedorov, 2002).

Literasi media ini dikembangkan melalui kegiatan yang dinamakan pendidikan media dan *media studies* (lihat, Fedorov, 2002). Kegiatan pendidikan media dan *media studies* itu pada umumnya dilakukan lembaga swadaya masyarakat, lembaga yang bernaung di bawah perguruan tinggi dan lembaga yang menyeleng-

garakan pendidikan dan pelatihan untuk guru. Artinya, di sini mesti dibedakan antara pendidikan media dan literasi media yang dijalankan sebagai program pendidikan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat dengan pendidikan tentang literasi media yang dijalankan sebagai satu program studi di perguruan tinggi seperti yang dijalankan di Rusia. Dengan demikian, kegiatan pendidikan literasi media tersebut dijalankan di luar lembaga pendidikan formal/persekolah meski ada kalanya dilakukan oleh lembaga pendidikan seperti lembaga pendidikan tinggi semisal yang dilakukan di Amerika Serikat dan Australia.

Bila diacukan pada karakteristik pendidikan nonformal seperti yang diungkapkan Sudjana (2000:30-33), maka kegiatan pendidikan literasi media yang dijalankan di berbagai negara itu pada dasarnya merupakan salah satu program pendidikan nonformal. Sudjana menyebutkan karakteristik pendidikan nonformal itu dapat dilihat, baik dari sisi tujuan, waktu, isi program, proses pembelajaran dan pengendalian:

A. Tujuan

1. Jangka pendek dan khusus
2. Kurang menekankan pentingnya ijazah

B. Waktu

1. Relatif singkat
2. Menekankan masa sekarang
3. Menggunakan waktu yang tidak terus-menerus

C. Isi Program

1. Kurikulum berpusat pada kepentingan-kepentingan peserta didik
2. Mengutamakan aplikasi
3. Persyaratan masuk ditetapkan bersama peserta didik

D. Proses Pembelajaran

1. Dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga

2. Berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat
3. Struktur program yang luwes
4. Berpusat pada peserta didik
5. Penghematan sumber-sumber yang tersedia

E. Pengendalian

1. Dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik
2. Pendekatan demokratis, hubungan antara pendidik dan peserta didik bercorak hubungan sejajar atas dasar kefungsi-an.

Dilihat dari aspek proses pembelajaran yang menjadi karakteristik pendidikan literasi media sebagai kelanjutan dari kemampuan baca-tulis seperti yang diungkapkan dalam *Buku Putih KTT Literasi Abad ke-21* di Berlin, menunjukkan pendidikan ini memang dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga. Selain itu, karena masyarakat mutakhir ini dijuluki juga masyarakat komunikasi massa, maka persentuhan dengan media massa menjadi tak terhindarkan lagi sehingga pendidikan literasi media pada dasarnya berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat. Tentu saja struktur program pendidikannya pun luwes, berpusat pada peserta didik dan menghemat sumber-sumber yang tersedia.

Praktik pendidikan literasi media di berbagai negara menunjukkan, pendidikan ini dapat dilangsungkan di mana pun. Sejauh ada peserta didik dan sumber belajar, kegiatan pembelajaran dilangsungkan. Beberapa organisasi yang menggerakkan pendidikan literasi media menggunakan media belajar mulai dari poster hingga membuka situs di internet. Namun dengan struktur program yang longgar.

Masyarakat masa depan Indonesia, tentu juga tak akan lepas dari pengaruh perkembangan dan aplikasi teknologi komunikasi dan

informasi. Permasalahannya, apakah masyarakat Indonesia memiliki kesiapan menghadapi ledakan arus informasi dan hiburan yang disampaikan media massa? Kesiapan masyarakat tersebut antara lain ditunjukkan dengan kemampuan masyarakat untuk mengolah informasi yang disampaikan media massa dan tidak mudah terpengaruh oleh apa yang ditawarkan media massa. Pendidikan media dan literasi media di berbagai negara selalu terkait dengan upaya untuk mencegah dampak negatif media massa melalui kegiatan pemberdayaan publik (lihat, Davis, 1992)

Kesiapan masyarakat menghadapi ledakan arus informasi dan hiburan melalui media massa tidaklah datang dengan sendirinya sejalan dengan makin banyaknya ragam media massa. Pendidikan media merupakan alternatif yang dilakukan di banyak negara untuk menangkal pengaruh negatif media massa sekaligus untuk memberdayakan publik sehingga berkemampuan untuk menghadapi ledakan informasi dan hiburan melalui media massa.

Pendidikan Melek Media

Pendidikan literasi media yang diamanatkan pada Pasal 52 (2) UU No. 32/2002 tentang Penyiaran dinyatakan dilakukan “organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan kalangan pendidikan”. Tentu saja, pendidikan tersebut tak dapat dilakukan dalam kerangka pendidikan sekolah. Dari banyak negara yang mengembangkan literasi media, hanya Kanada yang memasukan literasi media ke dalam kurikulum pendidikan sekolah. Di negara lain seperti di negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Australia dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Beberapa perguruan tinggi membentuk lembaga yang

mengembangkan literasi media bagi para guru sekolah seperti yang dilakukan di Babson College Amerika Serikat dan di Universitas North Caroline di Chapel Hill.

Dengan demikian, pada dasarnya pendidikan literasi media lebih merupakan kegiatan pendidikan nonformal (PNF). Menurut Sudjana (2000:23) PNF adalah “pendidikan yang program-programnya bersifat nonformal, memiliki tujuan dan kegiatan yang terorganisasi, diselenggarakan di lingkungan masyarakat dan di lembaga-lembaga, untuk melayani kebutuhan khusus para peserta didik”.

Besarnya peran PNF dalam pengembangan pendidikan literasi media tersebut dapat dilihat dari uraian Pungente (2002) mengenai faktor-faktor yang mendorong berkembangnya literasi media, yakni:

1. Seperti halnya program-program inovatif lainnya, literasi media mesti merupakan gerakan *grass-roots*. Para guru perlu berinisiatif dalam melakukan lobi untuk memasukan literasi media ke dalam kurikulum sekolah.
2. Otoritas pendidikan mesti memberikan dukungan yang jelas terhadap program-program seperti itu dengan memberi mandat pada pengajaran *media studies* di dalam kurikulum; membuat pedoman dan buku sumber; memastikan kurikulumnya dikembangkan; dan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan.
3. Fakultas-fakultas pendidikan mesti mempekerjakan staf yang mampu melatih guru masa depan dalam bidang ini. Jadi mesti ada dukungan akademik dari pendidikan tinggi dalam menulis kurikulum dan menyediakan konsultasi yang berkelanjutan.

4. Ada pelatihan pada distrik sekolah yang merupakan bagian dari implementasi program
5. Distrik sekolah membutuhkan konsultan yang memiliki kepakaran dalam literasi media, dan mampu membangun jaringan komunikasi
6. Menyediakan materi audio-visual dan buku-buku ajar yang cocok dan relevan dengan daerah tersebut
7. Mesti dibuat organisasi penunjang yang dibentuk dengan maksud menyelenggarakan lokakarya, konferensi, diseminasi kalawarta, dan mengembangkan unit-unit kurikulum. Sebagaimana layaknya organisasi profesional, organisasi ini mesti melintasi dewan sekolah dan distrik untuk melibatkan berbagai pihak yang berminat dalam literasi media.
8. Mesti ada instrumen evaluasi yang memadai yang cocok untuk sifat khas studi media
9. Karena literasi media mencakup berbagai keahlian dan kepakaran, maka mesti ada kolaborasi di antara guru, orang tua siswa, peneliti dan profesional media.

Dengan memperhatikan ke-9 faktor yang mendorong pertumbuhan pendidikan literasi media tersebut, jelas PNF memainkan peran yang besar. Penyelenggaraan program pendidikan literasi media tersebut, di negara maju sekalipun, seperti yang diuraikan di atas, bukan atau belum menjadi bagian dari kurikulum pendidikan sekolah. Padahal, makin hari makin disadari pentingnya pendidikan literasi media ini mengigat dunia sekarang ini menjadi tempat tumbuh subur media massa dengan pengaruh positif dan negatifnya.

Satu hal yang menarik diperhatikan, salah satu faktor pendorong perkembangan pendidikan literasi media adalah menjadikannya sebagai gerakan akar-rumput. Artinya, pendidikan literasi media sebagai satu

gerakan tentu bukan gerakan yang dicanangkan secara resmi oleh pemerintah atau lembaga-lembaga resmi lainnya melainkan lebih merupakan gerakan yang dikembangkan di tengah masyarakat oleh masyarakat sendiri. Hal ini bisa dimengerti bila mengingat, pendidikan literasi media pada dasarnya lebih merupakan kebutuhan warga masyarakat yang merasakan kekhawatiran dampak negatif media massa. Namun pada saat yang sama merasa tak memiliki akses terhadap isi media massa dan juga tidak memiliki cukup kekuatan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berimplikasi terhadap siaran/publikasi hiburan dan informasi yang disampaikan media massa.

Meski kemudian, Sejak tahun 2000-an, perhatian pemerintah di negara-negara maju terhadap pendidikan literasi media ini mulai berkembang. Di Amerika Serikat misalnya pada 1 Juni 2001 diselenggarakan Media Literacy Summit yang bertempat di Gedung Putih, Washington DC (lihat, National Youth Anti-Drugs Media Campaign, 2001). Begitu juga halnya di Irlandia, pemerintahnya memutuskan untuk memasukkan pendidikan literasi media ini ke dalam kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah (lihat, O'Neill, 2000).

Adanya perhatian terhadap pendidikan literasi media yang diikuti dengan adanya kebijakan untuk melakukan pendidikan media ini telah mengubah watak pendidikan literasi media dari sebuah gerakan sosial menjadi satu bidang studi di sekolah-sekolah atau setidaknya menjadi bagian dari kegiatan ekstra-kurikuler. Namun pada dasarnya, pendidikan literasi media ini merupakan kegiatan pendidikan yang dijalankan oleh masyarakat untuk masyarakat. Mengingat, tidak semua anggota

masyarakat yang menjadi khalayak media massa adalah mereka yang duduk di bangku sekolah dasar dan menengah. Pada saat ini, hampir semua orang sudah menjadi khalayak media massa. Apalagi bila mengingat, dunia sedang bergerak menjadi dunia yang dihuni masyarakat informasi, yang tingkat kebergantungannya pada media massa semakin tinggi.

Di Indonesia, pendidikan literasi media belum banyak berjalan. Setelah reformasi politik tahun 1998, yang kemudian memunculkan perubahan kebijakan dalam bidang media massa dan diundangkannya 2 UU yang berkaitan dengan media massa yakni UU No.40/1999 tentang Pers dan UU No.32/2002 tentang Penyiaran, upaya untuk mengembangkan kehidupan media massa lebih terfokus pada lembaga media massa. Karena itu banyak berdiri lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang pengawasan media/pers (*media/press-watch*). Padahal UU Penyiaran misalnya menyebutkan, pentingnya melakukan pendidikan media agar masyarakat bisa mencapai taraf literasi media.

Pendidikan literasi media pada dasarnya merupakan upaya penguatan dan pemberdayaan khalayak media massa. Pilihan penguatan khalayak media massa dilakukan mengingat isi media massa pada dasarnya tidak lagi dapat dikontrol publik. Setiap media massa memiliki mekanismenya sendiri untuk menentukan apa yang akan disampaikan kepada publik. Dengan demikian pilihan melakukan pendidikan literasi media merupakan pilihan yang tepat untuk kondisi kehidupan media massa sekarang ini dan perkembangan masyarakat saat ini. Indonesia sebagai negara yang sedang mengalami transisi menuju negeri demokrasi yang dewasa membutuhkan media massa yang berperan

mengarahkan masyarakat menuju kedewasaan dalam kehidupan demokrasi. Namun pada sisi lain, masa transisi ini juga diwarnai dengan pertumbuhan media massa sebagai bentuk kegiatan komersial yang merupakan wujud industri media. Sesuai dengan hukum yang berlaku dalam dunia industri, maka isi yang dipublikasikan media massa pun tentu tak akan bisa melepaskan diri dari mekanisme pasar produk industri yang mesti menyesuaikan diri dengan selera masyarakatnya.

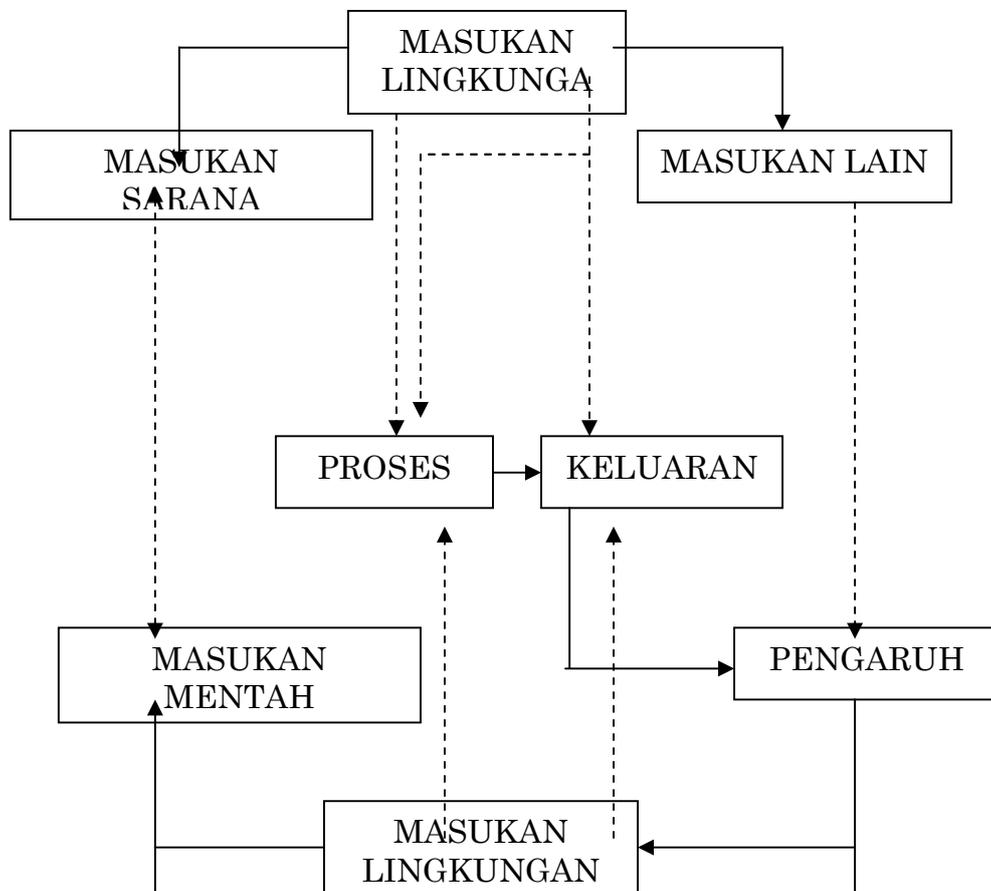
Itu merupakan beberapa fakta tentang dunia media massa Indonesia yang mendorong munculnya kebutuhan terhadap pendidikan literasi media. PNF tentu saja ditantang untuk memberikan kontribusi terhadap upaya mengembangkan literasi media di

kalangan masyarakat. Program-program literasi media tersebut tentu saja tak bisa diseragamkan, sehingga mesti dikembangkan program pendidikan literasi media untuk berbagai kelompok masyarakat seperti untuk siswa SD, siswa SMP, siswa SMU/SMK, mahasiswa, ibu rumah tangga dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Program Pendidikan Nonformal dalam Pendidikan Literasi Media

Program PNF, apa pun jenis dan ragam pendidikan yang dijalankan dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan komponen-komponen pendidikan nonformal. Sudjana (2000:34), menggambarkan hubungan fungsional antara komponen, proses dan tujuan PNF (PNF) sebagai berikut:

Gambar 1
Hubungan Fungsional
Antara Komponen-komponen Pendidikan nonformal



Berdasarkan gambar di atas, maka untuk tiap komponen pendidikan literasi media dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Masukan lingkungan, merupakan unsur-unsur yang mendorong terjadinya atau berjalannya program pendidikan nonformal. Dalam hal ini dapat berupa kelompok-kelompok kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik dan pengelola majalah dinding/majalah sekolah di SMP atau SMU/SMK, kelompok pengajian ibu-ibu atau kelompok taruna karya.
- b. Masukan sarana, merupakan sumber dan fasilitas yang memungkinkan terjadinya pembelajaran yakni fasilitator literasi media, bahan ajar, dan tempat berlangsungnya pembelajaran.
- c. Masukan mental, merupakan peserta didik pendidikan literasi media yang dapat berupa anggota kelompok pengelola majalah sekolah/majalah dinding, anggota kelompok kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik di sekolah atau anggota taruna karya dan anggota kelompok-kelompok pengajian.
- d. Masukan lain merupakan sarana yang mendukung peserta didik untuk menggunakan kemampuannya saat menjadi khalayak media massa.
- e. Proses merupakan interaksi edukasi khususnya antara fasilitator dan peserta didik/warga belajar pendidikan literasi media. Pembelajaran dapat menggunakan pendekatan partisipatif atau kolaboratif.
- f. Keluaran merupakan terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, nilai dan perilaku terhadap isi media massa
- g. Pengaruh merupakan dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah peserta didik menjadi orang yang memiliki kemampuan literasi media

Pendidikan literasi media tersebut dapat diarahkan pada kelompok-kelompok masyarakat dengan memberi prioritas kepada kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap rentan terhadap pengaruh negatif media massa. Pada umumnya, kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap pengaruh negatif tersebut adalah kelompok remaja yang berusia antara 14-18 tahun. Kelompok masyarakat ini sudah meninggalkan masa kanak-kanaknya namun belum mencapai taraf kedewasaan.

Kelompok usia remaja dipandang sebagai kelompok masyarakat yang tinggi daya imitatifnya terhadap apa yang dilihat dan didengar dari media massa. Padahal apa yang disiarkan media massa, seperti televisi, belum tentu merupakan contoh yang baik atau tepat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tayangan kekerasan, pornografis atau gaya hidup konsumtif tentu bukan hal yang cocok untuk ditiru. Gaya hidup konsumtif bagi remaja yang belum termasuk kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomis. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya bergantung kepada orang tua atau walinya.

Kompetensi literasi media ini, sekarang memang belum mendapatkan banyak perhatian di Indonesia, mengingat Indonesia sendiri menghadapi masalah literasi dalam artian keaksaraan karena jumlah orang yang tuna-aksara masih cukup besar jumlahnya. Wajar bila prioritas lebih banyak diberikan terhadap upaya mengatasi tuna aksara. Persentase orang yang tuna-aksara di Indonesia diperkirakan masih di atas 10% dari keseluruhan penduduk, sehingga masih diperlukan kerja keras untuk bisa membebaskan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang bebas tuna-aksara.

Akan tetapi, dalam masyarakat komunikasi massa seperti sekarang ini, orang yang tuna aksara pun pada dasarnya menjadi khalayak media massa. Karena untuk mendengarkan siaran radio atau menonton televisi tak banyak diperlukan kemampuan baca-tulis. Namun media massa dalam memberikan pengaruh baik negatif maupun positif, tidak ditentukan oleh kemampuan baca-tulis tersebut. Bahkan mungkin saja, ketidakmampuan baca-tulis justru akan mendorong semakin besarnya pengaruh negatif media massa. Mengingat mereka yang tuna-aksara akan lebih banyak menyerap dan tidak melakukan dialog dengan apa yang diperolehnya dari media massa dan juga tak memperoleh bandingan informasi dari media lain khususnya media cetak.

Bangsa Indonesia sudah mengalami kesenjangan antara struktur dan kultur tatkala bangsa ini melalui program pembangunan jangka panjangnya berubah dari struktur masyarakat agraris menjadi masyarakat industrial. Namun secara kultural, banyak hal yang menunjukkan bahwa meski secara struktural sebagian anggota masyarakat sudah memasuki masyarakat industrial namun secara kultural masih hidup di alam agrikultural. Akibatnya muncul berbagai permasalahan sosial akibat adanya kesenjangan struktural dan kultural seperti itu, yang antara lain tercermin dalam perilaku berlalu-lintas, perilaku belajar di lembaga pendidikan formal atau contoh lebih kongkret lagi keengganan untuk antri dan membuang sampah di sembarang tempat.

Pengalaman bangsa ini tatkala melakukan transisi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industrial dengan segala permasalahannya tentu tidak perlu diulangi lagi. Pendidikan literasi media merupakan salah satu

wujud persiapan dalam transisi dari masyarakat industrial atau agraris menuju masyarakat informasi. Bila pun terjadi kesenjangan antara struktur dan kultur, maka kesenjangan tersebut diharapkan tak begitu besar sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk menyeleraskannya.

Sejumlah negara sudah mempersiapkan dan bahkan sudah menjalankan program literasi media tersebut. Bahkan pada tahun 1982, wakil-wakil dari 19 negara mengikuti Simposium Internasional Pendidikan Media yang diselenggarakan UNESCO di Grundwald, Jerman yang menghasilkan Dokumen Grundwald. Dokumen tersebut menyatakan, media massa tak bisa dihindarkan lagi dalam kehidupan modern. Namun tidak perlu untuk mengutuk atau menyalahkan media melainkan yang lebih diperlukan adalah menerima media massa dan mengapresiasinya sebagai unsur kebudayaan yang penting di dunia saat ini. Bahkan dokumen tersebut menyatakan, "Sistem pendidikan dan politik perlu mengakui kewajibannya untuk mendorong warga negaranya memiliki kemampuan memahami secara kritis fenomena komunikasi." (UNESCO, 2003)

Tapi pada sisi yang lain, dokumen tersebut mengakui, "Disayangkan, sistem pendidikan nonformal dan informal masih kecil perannya dalam mendorong pendidikan media." (UNESCO, 2003). Karena itu, dokumen tersebut menyerukan:

1. Memprakarsai dan mendorong program-program pendidikan media yang komprehensif —mulai dari jenjang pra-sekolah hingga universitas dan pendidikan orang dewasa— yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan sikap yang akan mendorong perkembangan kesastraan kritis dan

- kompetensi yang lebih besar di antara pemakai media elektronik dan cetak. Idealnya, pendidikan seperti ini mencakup analisa produk-produk media, penggunaan media sebagai sarana untuk berkespresi dan memanfaatkan serta berpartisipasi secara efektif pada saluran-saluran media yang tersedia.
2. Mengembangkan kursus-kursus pelatihan untuk para guru dan para tokoh pendidikan untuk meningkatkan pemahaman terhadap media dan melatih mereka dengan metode pelatihan yang tepat, selanjutnya akan disebarluaskan kepada para siswa sebagai bentuk keterampilan yang perlu dimiliki para siswa.
 3. Mendorong penelitian dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi pendidikan media seperti dalam bidang psikologi, sosiologi dan ilmu komunikasi.
 4. Mendukung dan memperkuat tindakan yang dilakukan atau ditunjang UNESCO yang bertujuan untuk mengembangkan kerjasama internasional dalam pendidikan media. (UNESCO,2003).

Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan media yang pada akhirnya membawa pada literasi media memang sudah sejak lama disadari arti pentingnya oleh berbagai kalangan, termasuk UNESCO. Bahkan secara khusus UNESCO melalui Dokumen Grunwald itu menyebutkan pentingnya PNF melalui kegiatan pendidikan informal dan nonformal untuk menyelenggarakan pendidikan media, demi kebaikan dan peran warga negara dalam masyarakat yang semakin tak bisa melepaskan diri dari media massa.

Bila pada tataran internasional sudah seperti itu adanya, maka sudah barang tentu Indonesia sebagai negara yang menjadi anggota UNESCO pun diharapkan bisa mengembangkan

pendidikan media tersebut. Apalagi dasar hukum untuk melakukan pendidikan media tersebut, sesungguhnya sudah cukup kuat yakni UU Penyiaran tahun 2002.

Bila langkah pendidikan media tersebut tidak dilakukan dan kebanyakan orang Indonesia tidak dikategorikan sebagai *media literate* maka dikhawatirkan, media akan lebih memberikan dampak negatif bagi perkembangan dan masa depan bangsa ini. Hal tersebutlah yang sebetulnya disadari Jepang yang membentuk sebuah Kelompok Studi tentang Remaja dan Literasi Media, yang bgeranggotakan guru besar dari berbagai disiplin ilmu seperti pendidikan, komunikasi, sosial dan politik serta desain dari berbagai universitas untuk merumuskan pendidikan literasi media bagi warga Jepang.

Sudah sewajarnya bila langkah serupa pun mulai dilakukan di Indonesia. Bagaimana pun Indonesia memerlukan pendidikan literasi media, mengingat pertumbuhan dan perkembangan media massa di Indonesia, secara struktural, tak berbeda dengan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di negara lain. Pendidikan literasi media ini, pada umumnya, berada pada ranah pendidikan nonformal.

Penutup

Media massa merupakan bagian dari kehidupan manusia modern yang memberikan dampak positif dan negatifnya. Terhadap dampak negatif media massa tersebut, tidak cukup hanya dengan menyalahkan dan mengutuk media massa melainkan diperlukan langkah-langkah pendidikan literasi media, sehingga manusia bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kehadiran media massa.

Dalam tulisan ini memang belum mengambil istilah yang tegas

untuk literasi media. Di beberapa negara ada yang menyamakan namun ada pula yang membedakan antara studi media, pendidikan media, literasi media, dan kesadaran media. Istilah tersebut memang mengandung nuansa yang berbeda namun pada dasarnya memiliki kesamaan makna sehingga penggunaannya dapat saling dipertukarkan.

Pendidikan literasi media merupakan keharusan untuk dilaksanakan di Indonesia. Secara yuridis, keharusan tersebut dinyatakan antara lain dalam UU No.40/2002 tentang Penyiaran. Selain itu, berbagai konferensi internasional yang diselenggarakan UNESCO mendorong agar di negara-negara anggota UNESCO dikembangkan pendidikan literasi media. Dengan demikian Indonesian sebagai salah satu negara anggota UNESCO memiliki kewajiban untuk mengembangkan pendidikan literasi media ini.

Dokumen Grunwald yang dihasilkan dalam sebuah simposium yang difasilitasi UNESCO menyebutkan perlunya pendidikan nonformal memainkan peran yang besar dalam menyelenggarakan pendidikan literasi media ini.

Daftar Pustaka

ACCU News.2001. "Tokyo Statement on Nonformal Education" Adopted as Asian Determination—2001 ACCU-APPEAL Joint Planning Meeting on Regional NFE Programmes in Asia and the Pacific dalam ABD 2001 Vol. 32 No.2

Bertelsmann Stiftung & AOL Time-Warner Foundation.2002. *White Paper: 21st Century Literacy In a Convergent Media World*, Gütersloh: Bertelsmann Stiftung & AOL Time-Warner Foundation

Center for Media Literacy.2003. *What Media Literacy is Not*. [www.document] Dapat diakses: www.medialit.org/reading_room/article380.html. Tanggal akses: 30 September 2003

Fedorov, Alexander. 2002. *Media Education and Media Literacy: Expert's Opinion*. Makalah. Moskow: Russian Foundation for Humanities (RGNF)

Fukuyama, Francis & Wagner, Caroline S. 2000. *Information and Biological Revolutions: Global Governance Challenges*, Washington, D.C.: RAND's Science and Technology Policy Intitute

Iriantara, Yosai (1986). Model Pelatihan Literasi Media untuk Pemberdayaan Khalayak Media Massa: Studi Pengembangan Model Pelatihan Literasi Media untuk Keberdayaan Ibu Rumah Tangga Khalayak Media di Kota Bandung (*Disertasi*), PPs UPI (tidak diterbitkan).

Pungente, John. 2002. *Nine Factors that Makes Media Literacy Flourish*. [www.document] Dapat diakses: www.media-awareness/ca/resources/educational/teaching_backgrounders/media_literacy/9factors.cfm. Tanggal akses: 25 September 20003.

Murray, Janet. 2003. "Contemporary Literacy: Essential Skills for the 21st Century" dalam *Online Educator* [On-line] Vol. 10 No.2-Maret/April 2003. Tersedia: www.infotoday.com/MMSchool/mar03/murray/shtml 7 halaman.

- Oberg, Dianne. 1993. "Another Literacy for the 21st Century: Media and Information Literacy" dalam *ira Connection* (8)1, 9-11 [on-line]. Tersedia: www.slis.ualberta.ca/oberg_literacy.htm [12 September 2003]
- O'Neill, Brian, 2000. "Media Education in Ireland: An Overview" dalam *Irish Communication Review* Vol.8/2000 hlm. 57-64
- Rogers, Everette M., 1986. *Communication Technology The New Media in Society*, New York: The Free Press
- Sudjana, D. 2000. *Pendidikan nonformal Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung, Asas*. Bandung: Falah Production
- UNESCO.2003. *The Grunwald Document: The Challenge of Media Education*. [www.document] Dapat diakses: medialit.org/reading_room/article133.htm. Tanggal akses: 11 Oktober 2003.
- UNESCO, 2002. "Literacy-The 877 Milion Left Behind" dalam *Education Today* No. 2/2002.